

**PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA
DI DESA DAUH PURI KELOD KECAMATAN DENPASAR BARAT
KOTA DENPASAR**

Ni Luh Gede Astariyani¹, I Gusti Ngurah Wairocana²,
Gede Marhaendra Wija Atmaja³ dan I Ketut Sudiarta⁴

ABSTRAK

Penyusunan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat diperlukan dalam penentuan dasar hukum menyelenggaraan kegiatan di desa. Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan peraturan desa melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan dan evaluasi. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Pentingnya peraturan desa sebagai salah satu bentuk perundang-undangan pada tingkat desa selain peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa perlu adanya kesamaan pemahaman akan arti penting produk hukum tersebut. Bentuk hasil dari penyusunan peraturan desa yang baik dihasilkan dari kemampuan dari pembentuknya. Pentingnya pelatihan penyusunan peraturan desa untuk lebih memahami dan dapat dijadikan pedoman dalam pembentukan Peraturan Desa.

Kata kunci : Peraturan Desa, Dauh Puri Kelod

ABSTRACT

The formulation of village regulations in the administration of village governance is very necessary in determining the legal basis for organizing activities in the village. The content of the Village Regulation is all the content material in the context of village governance, village development and community empowerment, as well as further elaboration of the provisions of the higher laws and regulations. and evaluation. Planning for the compilation of village regulations is determined by the Village Head and the Village Representative Body (BPD) in the Village Government's work plan. The importance of village regulations as a form of legislation at the village level in addition to village head regulations and village head decisions requires a common understanding of the importance of the legal product. The form of results from the formulation of good village regulations results from the capabilities of its formers. The importance of training in drafting village regulations to better understand and be used as guidelines in the formation of village regulations

Keywords: Village Regulations, Dauh Puri Kelod

¹ Fakultas Hukum Universitas Udayana ; luh_astariyani@unud.ac.id

² Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana ; waorocanangurah@yahoo.co.id

³ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana; haen.wia@gmail.com

⁴ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana; sudiarta@fl.unud.ac.id

1. PENDAHULUAN

Desa Dauh Puri Klod dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 7/pem/II.A/2-57/1980 tanggal 1 April 1980 dengan Status Desa Persiapan sebagai pengembangan wilayah administratif Desa Dauh Puri. Pada tanggal 1 Juli 1980 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 57 Tahun 1980 tentang Penetapan Desa-desanya Persiapan menjadi Desa Definisi di Kota Administratif Denpasar dengan kode desa 51.03.72.2013.

Luas wilayah Desa Dauh Puri Klod ± 188 Ha dengan batas-batas wilayah : Utara : Kelurahan Dauh Puri, Timur : Desa Dangin Puri Klod dan Kelurahan Panjer, Selatan : Kelurahan Sesetan dan Kelurahan Pedungan dan Barat : Desa Dauh Puri Kauh

Desa Dauh Puri Klod membawahi 11 (sebelas) Dusun terdiri dari :

1. Dusun Eka Sila
2. Dusun Batu Bintang
3. Dusun Bumi Banten
4. Dusun Bumi Kerthi
5. Dusun Bumi Shanti
6. Dusun Bumi Asri
7. Dusun Bumi Sari
8. Dusun Sanglah Barat
9. Dusun Sanglah
10. Dusun Sanglah Utara
11. Dusun Sanglah Timur

Masing-masing dusun di Desa Dauh Puri Klod, dipimpin oleh Kepala Dusun / Klian Dinas. Kepala Dusun sebagai perangkat pemerintah desa.

Sebagai perangkat pemerintah desa, Kepala Dusun mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan hak.

Desa Dauh Puri Klod merupakan dataran rendah dengan bentuk permukaan bentang wilayah datar. Iklim yang berlaku pada dasarnya sama dengan iklim yang berlaku di wilayah Indonesia pada umumnya yaitu iklim tropis, meliputi :

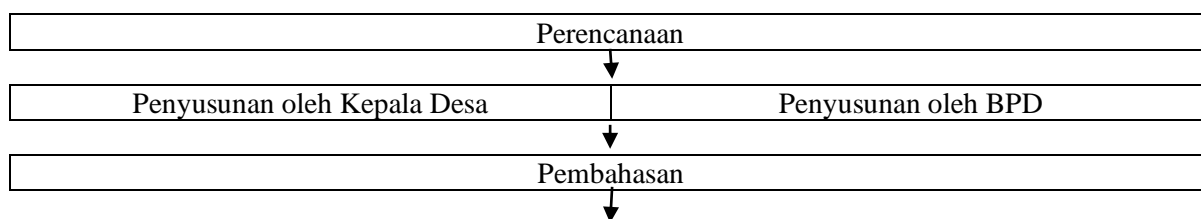
- Musim hujan dari bulan Oktober s/d Maret
- Musim kemarau dari bulan April s/d September

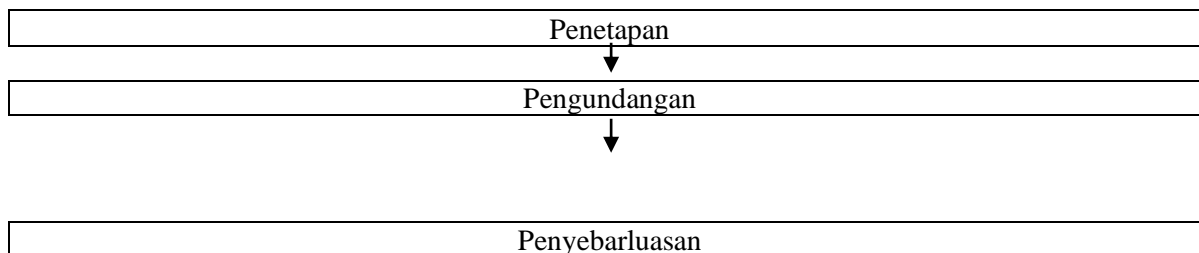
Dari segi kependudukan, penduduk di Desa Dauh Puri Klod adalah sangat heterogen, terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama yang secara umum bahwa penduduk terdiri dari para urban yang tinggal menetap, memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap.

Menurut data profil dan monografi desa tahun 2012, jumlah penduduk Desa Dauh Puri Klod telah mencapai 14.915 jiwa dengan pendidikan mulai dari pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas, dan Perguruan (Diploma, S1, S2, S3), dengan mata pencaharian ada Pegawai Negari Sipil, Pegawai Swasta, Pengusaha dan pekerjaan lain yang halal untuk kehidupan keluarga.

Berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, maka setiap 12,5 m² dihuni oleh satu orang penduduk dan luas 12,5 m² belum dikurangi dengan panjang, lebar jalan dan fasilitas umum seperti rumah sakit, toko kios, warung dapat diperkirakan setiap luas lahan 10 m² dihuni oleh satu orang penduduk. Asumsi sementara bahwa penduduk desa Desa Dauh Puri Klod termasuk wilayah berpenduduk padat di kota Denpasar.

Tingginya intensitas kebutuhan akan tindakan pemerintahan, perkembangan ekonomi, hubungan antar masyarakat, hubungan administrasi pemerintah dan berbagai kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat memerlukan perangkat pengaturan terutama peraturan desa. Pentingnya perangkat hukum dalam bentuk peraturan desa sehingga perlu dilakukan pelatihan terkait dengan penyusunan peraturan desa yang baik. Penyusunan peraturan desa yang baik sebagaimana dimaksud dalam bagan di bawah ini :





2. METODE PELAKSANAAN

Tingginya intensitas kebutuhan akan tindakan pemerintahan, perkembangan ekonomi, hubungan antar masyarakat, hubungan administrasi pemerintah dan berbagai kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat memerlukan perangkat pengaturan terutama peraturan desa. Menurut D.W.P Ruitter dalam kepustakaan di eropa kontinental yang dimaksud peraturan perundang-undangan mengandung 3 unsur : Norma hukum (*rechtsnorm*), berlaku ke luar (*rechtnorm*) dan bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruime zin*).Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dan tanya jawab dan para peserta juga diberikan contoh format dan perumusan norma hukum dalam peraturan desa.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Tahapan awal dilakukan dengan membentuk tim dan penyusunan TOR kegiatan dilanjutkan dengan pengurusan surat izin di Pemda Provinsi Bali dan Kota Denpasar. Tahapan kordinasi, dilakukan oleh tim pengabdian dengan aparat desa untuk menentukan waktu dan tempat pengabdian. Tahap pelaksanaan dilakukan mempergunakan metode bimbingan teknis kepada aparat desa berkaitan dengan teknik penyusunan peraturan desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

1. Peraturan Desa;
2. Peraturan Kepala Desa;

3. Keputusan Kepala Desa.

Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan. Materi muatan Keputusan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diumumkan dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Desa.

Kerangka Struktur Peraturan Desa sebagai berikut :

1. Penamaan/ Judul;
2. Pembukaan;
3. Batang Tubuh;
4. Penutup; dan
5. Lampiran (bila diperlukan).

Gambar :

Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Dauh Puri Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar



4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pelatihan penyusunan peraturan desa yang dilakukan di Desa Dauh Puri Kelod, dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Peserta pelatihan yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala Dusun dan Anggota Badan Perwakilan Desa memiliki keinginan yang tinggi untuk mengikuti pelatihan. b) Desa Dauh Puri Kelod sudah memiliki beberapa peraturan desa baik Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta peraturan desa yang merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada, Rektor Universitas Udayana, Ketua LPPM beserta staf terima kasih atas seleksi proposal dan atas dana yang diberikan lewat program pengabdian kepada masyarakat, kepada tenaga yang diberikan dalam pelaksanaan di lapangan, sehingga pengabdian kepada masyarakat terlaksana sesuai rencana.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H.S Attamimi , 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I- PELITA IV)*, Disertasi Doktor UI, Jakarta
- Astariyani, Ni Luh Gede 2016, *Penyusunan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Pelayanan Publik*, Laporan Penelitian HUPS FH Unud, hlm. 23
- Prayudha Wijaya, Adam Nugroho, Sugeng Rahardjo, (Eds), 2008, *Panduan Membentuk Organisasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (OPKAD)*, (Jakarta: LGSP/Local Governance Support Program), hlm 23
- Astariyani, Ni Luh Gede, Wairocana, IGN, 2019, *Delegation of Governor Regulation in Ensuring Utility and Justice*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8 NO.3. FH Unud, hlm.323